




RENCANA KERJA

2026

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



KANTOR BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MORE INFO

 Jalan Raja Haji Fisabilillah Pasi Peti

 bkpsdm.anambaskab@gmail.com

 [bkpsdm.anambaskab](https://www.instagram.com/bkpsdm.anambaskab)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan, dengan mempertimbangkan lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dalam rangka mengemban amanah misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja tahun 2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Rencana Kerja Tahun 2026. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Komitmen dan motivasi yang tinggi melaksanakan rencana yang telah tersusun ini. Harapan kami, Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 196801262000032002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	27
2.4 Review Terhadap RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tema, Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam RKPD Tahun 2026	36
3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	36
3.4 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	52





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen kepegawaian. Diharapkan dari perencanaan tersebut, akan lahir aparatur yang kompeten, berintegritas, tepat guna, berdaya saing, maju dan tentunya juga dengan mengedepankan aspek akhlakul karimah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, serta mengacu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renstra) dan RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diawali dengan persiapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan



Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja BKPSDM, orientasi mengenai Renja BKPSDM, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Renja BKPSDM yang meliputi tahap perumusan Rancangan Renja BKPSDM dan tahap penyajian Rancangan Renja BKPSDM. Proses penyusunan Renja BKPSDM diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDM. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDM dilakukan dengan pengesahan draft oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDM menetapkan Renja BKPSDM untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDM pada tahun 2026.



Pada tahun 2026 merupakan tahun keenam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RPKD Tahun 2026, adalah “Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”. Yang kemudian dijabarkan menjadi 4 Rancangan Indikator Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemanjapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.





1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi, dan Antarprovinsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2026;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);





29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta guna memadupadankan, menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program dan kegiatan dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026 adalah sebagai :





1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan dalam program dan kegiatan tahun 2026
3. Menyediakan dokumen sebagai sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sitematika Penulisan

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Perumusan Tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja utama tahun 2024 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2026
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran 2024 mencapai 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.749.717.337,00 (82,85%) dari total pagu anggaran Rp. 9.353.516.312,00 yang terdiri dari 3 program dengan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Berikut adalah Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM di tahun 2024 serta rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan





Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 menurut indikator program dapat dilihat dalam tabel T-C.29 dan tabel T-C 30 sebagai berikut:

Tabel T-C 29
Capaian Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		1	Indeks Profesionalitas ASN	57	76,44	134,11%
1.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur	2	Indeks Sistem Merit	287	297,5	103,66%
Capaian Sasaran-1						118,88%
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	66,00	0	0
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,50	72,51	85,81%
		5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,84	111,05%
Capaian Sasaran-2						65,62%

Dari tabel T-C 29 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama. Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah di targetkan. Berikut diuraikan mengenai capaian kinerja sasaran strategis dan indikatornya.

1. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dalam Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN diperlukan pengukuran terhadap Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang bertujuan untuk mengukur statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dapat dilihat dari tabel T-C 29 diatas bahwa pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN BKPSDM telah berjalan dengan sangat baik dengan capaian penilaian yang di atas rata-rata serta realisasi pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan target yg telah dibuat. Apabila pengukuran Indeks Profesionalitas





ASN pada suatu instansi tidak memperhatikan dimensi kompetensi, maka akan menghasilkan suatu dimensi kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan serta dapat berpengaruh juga terhadap dimensi kualifikasi dan dimensi disiplin.

2. Indeks Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nilai Sistem Merit adalah angka kumulatif hasil penilaian dari kriteria penilaian sistem merit yang meliputi : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Pendukung, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem merit di instansi. Pengukuran indeks sistem merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memastikan jabatan birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang professional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN tanpa membedakan latar belakang politik. Pelaksanaan penilaian sistem merit tahun 2024 ditunda sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 04 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara karena adanya pengalihan pengawasan dari KASN ke Kementerian PANRB dan BKN. Regulasi baru masih menunggu penggantian Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 terkait penilaian penerapan sistem merit Tahun 2024, Sehingga data capaian yang digunakan diatas menunjukkan ketercapaian indeks sistem merit tahun 2023. Berdasarkan Tabel T-C 29 diatas bahwa pelaksanaan indeks sistem merit pada BKPSDM mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks Sistem Merit dengan target kinerja 287 dengan terrealisasi 297,5 dengan demikian tingkat capaian kinerja sebesar 103,66 %. Indikator Kinerja Utama ini belum tercapai 100% karena ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dari 8 Aspek penilaian Sistem Merit khususnya di aspek Pengembangan Karir di bawah ini yaitu :

- a) Belum tersedianya Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
- b) Belum tersedianya rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi.
- c) Belum terpenuhinya kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan



kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 telah memasuki periode Road Map ketiga (akhir). Setiap periode (lima tahunan), pelaksanaan RB dilakukan berdasarkan pada kebijakan Road Map RB Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai acuan instansi pemerintah dalam mewujudkan RB secara nasional dan berkelanjutan.

Data menunjukkan tidak adanya realisasi kinerja maupun capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa kondisi seperti pada aspek perencanaan, Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada aspek pelaksanaan, hasil pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dapat dirasakan masyarakat, karena belum sepenuhnya fokus pada hasil (outcome) dan dampak (impact). Sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penyempurnaan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, maka untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dilaksanakan penilaian.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kemudian agar mengetahui nilai dari SAKIP tersebut dibutuhkanlah suatu tahapan



atau proses evaluasinya yang diturunkan dari peraturan presiden tersebut pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang secara khusus bertujuan:

- a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) Memberi saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Tabel T-C 29 diatas pencapaian target indikator kinerja utama pengukuran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) BKPSDM meskipun belum maksimal namun sudah termasuk dalam kategori baik dalam pelaksanaannya guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi Belum dapat mencapai nilai SAKIP seperti harapan karena berdasarkan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat beberapa catatan agar kedepan lebih meningkatkan Nilai AKIP BKPSDM yaitu :

1. Melengkapi Mengoptimalkan komponen perencanaan kinerja dari aspek sub komponen pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja;
2. Mengoptimalkan komponen pengukuran kinerja dari aspek sub komponen kualitas pengukuran kinerja;
3. Mendokumentasikan Mengoptimalkan manajemen kinerja yang handal atas hasil komponen evaluasi akuntabilitaskinerja instansi dari aspek sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang di lakukan terhadap tamu perangkat daerah yang datang ke kantor BKPSDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada tahun 2024. Responden survei adalah terdiri dari pejabat administrator dan pengawas serta Pelaksana. Penentuan jumlah sampel minimum dihitung dengan menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan dengan jumlah pegawai yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Persentase kepuasan pegawai adalah rasio antara jumlah responden yang



menyatakan puas dan sangat puas (yang memberikan skor 4 dan 5 dalam skala Likert 1 – 5) terhadap kualitas layanan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah seluruh responden Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, apabila disandingkan data realisasi dan capaian tahun sebelumnya, nilainya mengalami trend kenaikan. Secara umum seluruh proses penilaian indeks kepuasan masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel diatas perlu adanya peningkatan kualitas secara terus menerus guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk aparatur dan masyarakat. Secara umum seluruh proses penilaian indeks kepuasan masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel T-C 29 diatas perlu adanya peningkatan kualitas secara terus menerus guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk aparatur dan masyarakat.



Tabel T-C.30

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2021-2026) (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Reliasasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	85,71%	100%	100%	85,71%	100%	100%	100%
5.03.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	
5.03.01.2.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
5.03.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	104%	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	
5.03.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	
5.03.01.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	



5.03.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	0	3 Paket	3 Paket	0	3 Paket	3 Paket	
5.03.01.2.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0	3 Orang	3 Orang	0	3 Orang	3 Orang	
5.03.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	0	3 Paket	3 Paket	0	3 Paket	3 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
5.03.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	100%	100%	0	100%	100%	100%
5.03.01.2.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	0	3 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	
5.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	
5.03.01.2.07.06	Sub Kegiatan :	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0	5 Unit	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	





	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
5.03.01.2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	
5.03.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
5.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
5.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	
5.03.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.09.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	
5.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	
5.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	0		100%	0	0	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	86%	61%	74%	74%	100%	80%	80%	80%
	Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100%	61%	100%	100%	100%	80%	80%	80%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100%	250 Dokumen	250 Dokumen	
	Sub Kegiatan:	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	2 Lembaga	2 Lembaga	





	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN	82%	71%	78%	78%	100%	80%	80%	80%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.282 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	100%	250 Dokumen	250 Dokumen	
	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	25 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	
	Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Berkinerja Baik	96%	93%	95%	95%	100%	96%	96%	96%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	65%	53%	61%	61%	100%	65%	65%	65%
	Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	65%	53%	61%	61%	100%	65%	65%	65%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	





Dari tabel TC. 30 dapat dijelaskan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 belum bisa dilakukan evaluasi realisasi program/kegiatan/sub kegiatan karena Tahun 2025 merupakan tahun berjalan Renja yang mana capaian realisasi belum dapat diukur. Dalam hal ini hanya dapat melakukan perbandingan antara target Renstra dan target renja Tahun 2024, yakni antara lain :

1. Target program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja yang tidak memenuhi target Renstra dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang belum stabil dikarenakan kebijakan pemerintah pusat untuk memotong dan menunda dana transfer pemerintah pusat ke daerah yaitu pada Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Target program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja hampir sebagian besar memenuhi target renstra.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2026 untuk diadakan kembali program/kegiatan yang tidak terealisasi di Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian



dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 7 jabatan struktural dan rumpun jabatan fungsional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, dan pengembangan kompetensi ASN serta tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

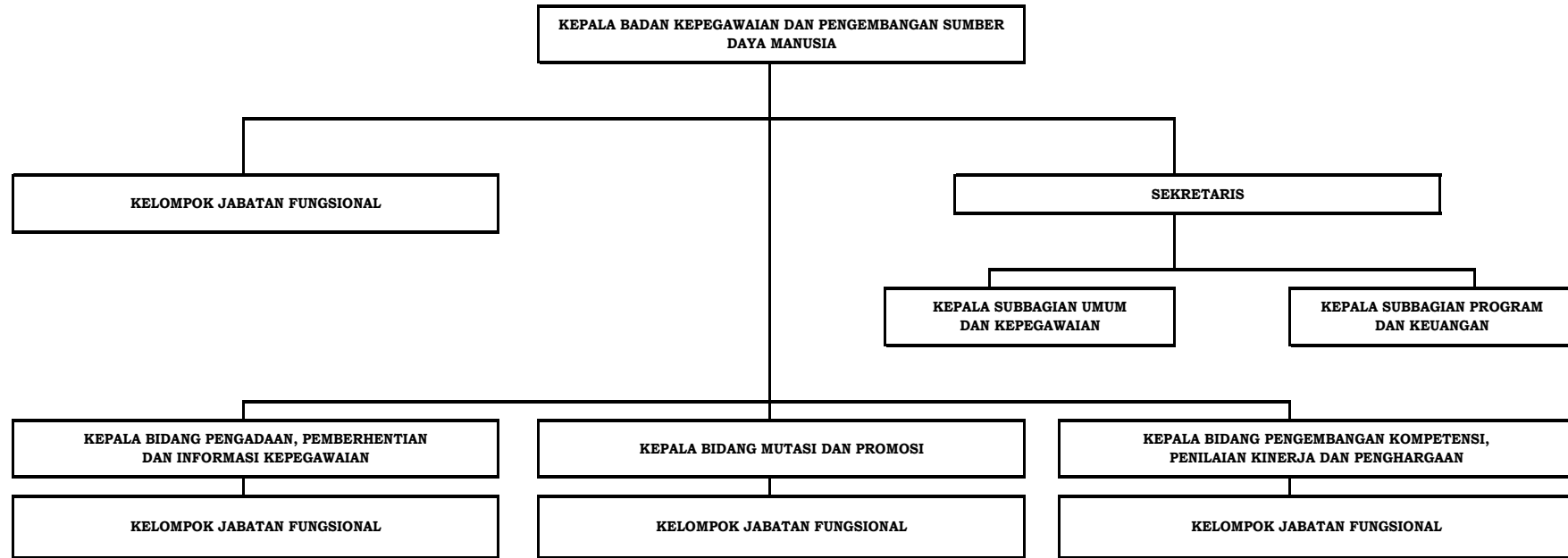
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPSDM;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPSDM;
7. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lembaga teknis daerah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS





Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan dibantu :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal BKPSDM;
- b. Melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis, pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan BKPSDM;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. Menyiapkan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
- h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BKPSDM;



- i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup BKPSDM;
 - b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran BKPSDM;
 - c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data BKPSDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun perencanaan strategis BKPSDM;
 - e. Menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional BKPSDM;
 - f. Menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
 - g. Menyusun laporan kinerja BKPSDM;
 - h. Menyusun indikator kinerja utama BKPSDM;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja Individu ASN di lingkup BKPSDM;
 - j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BKPSDM;
 - k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja BKPSDM;
 - l. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
 - m. Melakukan koordinasi penggunaan anggaran BKPSDM;
 - n. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
 - o. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Program dan Keuangan; dan



- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- b) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian. Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Mutasi dan Promosi
Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi dan promosi. Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan. Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi. Koordinator atau subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan



dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada setiap pengelompokan uraian fungsi.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:





Tabel T-C.31
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks profesionalitas ASN	-	-	47	50	54	57	60	49,56	49,94	64,39	76,44	60	
2	Indeks Sistem Merit	-	-	280	285	286	287	288	285	270,5	297,5	297,5	288	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	51,78 (CC)	62,00 (B)	64,00 (B)	66,00 (B)	68,00 (B)	64,77 (B)	64,54 (B)	-	-	68,00 (B)	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	-	78,85 (B)	82,26 (A)	83,48 (A)	84,50 (A)	85,64 (A)	81,29 (A)	73,06 (BB)	68,26 (B)	72,51 (BB)	85,64 (A)	
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)	78,93 (B)	79,13 (B)	87,69 (B)	88,84 (B)	81 (B)	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN;
2. Peningkatan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai Dengan NSPK
3. Peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Workshop dan lain-lain;
4. Pelaksanaan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD dan kondisi eksisting untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan maka dalam menindaklanjuti isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi aparatur harus terus dilanjutkan demi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti pemberian bantuan pendidikan dan tugas belajar serta Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan. Diklat penunjang tugas dan fungsi aparatur perlu dianggarkan kembali dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja;
3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
4. Perlunya pengembangan kompetensi jabatan fungsional khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada formasi teknis;
5. Khusus untuk pengembangan kompetensi manajerial perlu dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) bagi pejabat pengawas,



- administrator dan jabatan pimpinan tinggi. Khusus untuk penganggaran pada tahun 2026 alokasi anggaran untuk diklatpim perlu diprioritaskan karena dapat berdampak terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan capaian visi dan misi kepala daerah;
6. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi setiap tingkatan jabatan secara transparan, adil, dan bebas intervensi perlu untuk dilakukan guna mewujudkan pejabat yang Berkompetensi.
 7. Perlunya peningkatan kolaborasi antar unit kerja dalam upaya untuk meningkatkan profesionalitas ASN.

Selain isu-isu penting yang telah diuraikan diatas Agenda kegiatan tahun 2026 yang diupayakan lebih optimal adalah pelaksanaan inovasi daerah, Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah, sebagai wujud dalam pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) BKPSDM melaksanakan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui pengintegrasian perspektif gender pada setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan Tahun 2026, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Review atau telaah terhadap Rancangan RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel T-C.32

Review Terhadap RKPD Tahun 2026

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang urusan Permerintahan				Rp7.949.391.965	Unsur Penunjang urusan Permerintahan				Rp10.766.466.535	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp7.949.391.965	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp7.547.479.143	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Rp5.750.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Rp5.750.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp3.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp3.750.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp6.241.127.965	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp6.399.917.194	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	Rp6.079.391.965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	Rp6.238.181.194	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp161.736.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp161.736.000	

Rencana Kerja BKPSDM RKA

2026



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat	0%	Rp147.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat	0%	Rp147.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	Rp107.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	Rp107.500.000	Belum ada pengadaan Pakaian Dinas dari tahun 2021-2025
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp40.000.000	Besaran anggaran telah dihitung sesuai kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp757.224.584	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp765.853.396	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp1.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp8.609.812	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp64.475.016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp64.475.016	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp9.613.452	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp9.613.452	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp22.368.116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp22.368.116	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp17.243.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp17.243.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp2.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp2.520.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp641.024.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp641.024.000	Besaran anggaran telah dihitung sesuai kebutuhan





Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp141.264.918	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp162.352.666	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp43.629.216	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp43.629.216	
Pengadaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp24.887.298	Pengadaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp24.887.298	Penambahan ASN (PPPK) 4 Orang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp56.245.235	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp77.332.983	Besaran anggaran telah dihitung sesuai kebutuhan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp16.503.169	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp16.503.169	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp44.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp157.887.322	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp13.423.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp14.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp14.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Rp20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	Rp129.963.822	Gaji PPPK Paruh Waktu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp18.622.387	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp38.182.387	





Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp12.942.387	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp32.502.387	Besaran anggaran telah dihitung sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp5.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp5.680.000	Besaran anggaran telah dihitung sesuai kebutuhan
Program Kepegawaian Daerah		Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab	86%	Rp124.746.000	Program Kepegawaian Daerah		Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab	86%	Rp1.587.708.370	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	86%	Rp42.034.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	86%	Rp304.933.370	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	Rp5.678.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	Rp87.103.000	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Rp25.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Rp100.000.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp5.678.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp57.073.000	Kebutuhan anggaran pengelolaan SIMPEGNAS
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen	Rp5.678.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen	Rp60.757.370	
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN	82%	Rp11.356.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN	82%	Rp848.347.000	
Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	Rp5.678.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	Rp773.149.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan Uji Kompetensi





	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen	Rp5.678.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen	Rp75.198.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan Ujian Dinas
	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	1 Orang	Rp60.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	1 Orang	93.584.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	Rp60.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	93.584.000	Besaran anggaran telah dihitung sesuai kebutuhan
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Aparatur Berkinerja Baik	96%	Rp11.356.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Aparatur Berkinerja Baik	96%	Rp340.844.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Rp5.678.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Rp106.102.000	Kebutuhan anggaran Peningkatan Monev Kinerja ASN
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	Rp5.678.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	Rp234.742.000	Kebutuhan anggaran Peningkatan Cakupan Monev Disiplin ASN
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	65%	Rp468.656.111	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	65%	Rp1.501.315.200	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	65%	Rp468.656.111	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	65%	Rp1.501.315.200	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Rp468.656.111	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Rp1.501.315.200	Kebutuhan anggaran Pelaksanaan Latsar CPNS dan Orientasi PPPK Formasi Tahun 2024 dan Pelaksanaan Diklat PIM





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026. Untuk lebih jelasnya mengenai Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terhadap Rencana Kerja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I L I H I L			



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik tahun 2026-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Transformasi Tata Kelola adalah merupakan salah satu dari Lima Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2026-2029 yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana Transformasi Tata Kelola itu sendiri mempunyai definisi kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Dalam Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2026-2029 terdapat upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) terkait Agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola yaitu :

1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun, serta pemberantasan korupsi)
2. Penguatan integritas partai politik

Tabel 3.1
Agenda Pembangunan (Rancangan Teknokratik RPJMN 2026-2029)
dan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026

No.	Agenda Pembangunan (Rancangan Teknokratik RPJMN 2026-2029)	Rencana Kerja BKPSDM Kepulauan Anambas Tahun 2026
(1)	(2)	(3)
1.	Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur



<p>“Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil”</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel</p>
---	--

3.2 Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam RKPD Tahun 2026

Tema Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 yaitu percepatan pengelolaan potensi ekonomi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari, yang ditopang oleh kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada karakteristik kepulauan.”.

Visi, Misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 adalah :

““Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 tersebut, dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Luhur.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Sedangkan Rancangan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.





3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam program/kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2026;
- b. Menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran 2026;
- c. Menjadi acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan program kerja.
- d. Upaya menciptakan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam hal pengelolaan kepegawaian berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD maka perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dari keempat misi yang telah disebutkan di atas, misi yang sesuai dengan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah misi ke 3 yaitu **Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif**".

"Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani" adalah birokrasi yang sesuai dengan sasaran dari agenda nasional tentang reformasi birokrasi. "Bersih" adalah birokrasi yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, "Profesional" adalah birokrasi yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi, "melayani" adalah birokrasi yang senantiasa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi yang bersih adalah birokrasi yang berakhlak, sehingga rumusan ini melengkapi rumusan visi tentang masyarakat yang berakhlak. Birokrasi yang profesional dan melayani adalah jenis birokrasi yang mutlak dibutuhkan ketika





Kabupaten Kepulauan Anambas hendak menjelma menjadi pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing, mengingat birokrasi menjadi satu faktor penentu majunya pembangunan di suatu daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Memperhatikan rumusan tujuan dan sasaran sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD dan isu strategis bidang kepegawaian Kabupaten Kepulauan Anambas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dinyatakan pada tabel berikut:





Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur		Indeks Profesionalitas ASN	60
		Meningkatnya Profesionalitas Aparatur	Indeks Sistem Merit	288
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	68,00 (B)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	85,64 (A)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 (B)

3.4 Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian





yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kegiatan:

- 1.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel



- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kegiatan:

- 2.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 2.2 Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN





2.3 Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

2.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

b. Pembinaan Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Reformasi birokrasi pada pemerintahan pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang profesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kegiatan:

3.1 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terbagi menjadi sub kegiatan antara lain:

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan





Tabel T-C.34.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp7.949.391.965	
05 03	KEPEGAWAIAN				Rp7.480.735.854	
05 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp7.355.989.854	
05 03 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	Rp5.750.000	
05 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Dokumen	Rp3.750.000	DAU
05 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	Rp2.000.000	DAU
05 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp6.241.127.965	
05 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	25 Orang/Bulan	Rp6.079.391.965	DAU
05 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	12 Dokumen	Rp161.736.000	DAU





05 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	1 Laporan	0,00	DAU
05 03 01 2.05 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	Rp147.500.000	
05 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	3 Paket	Rp107.500.000	DAU
05 03 01 2.05 07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	3 Orang	Rp40.000.000	DAU
05 03 01 2.06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp757.224.584	
05 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp1.000	DAU
05 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	Rp64.475.016	DAU
05 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM	2 Paket	Rp9.613.452	DAU
05 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	Rp22.368.116	DAU
05 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp17.243.000	DAU
05 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	1 Laporan	Rp2.500.000	DAU
05 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	1 Laporan	Rp641.024.000	DAU
05 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp141.264.918	
05 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM	2 Unit	Rp43.629.216	DAU
05 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp24.887.298	DAU
05 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	5 Unit	Rp56.245.235	DAU
05 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	1 Unit	Rp16.503.169	DAU





05 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp44.500.000	
05 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	1 Laporan	Rp10.000.000	DAU
05 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	Rp14.500.000	DAU
05 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	Rp.20.000.000	DAU
05 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp18.622.387	
05 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	12 Unit	Rp12.942.387	DAU
05 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	15 Unit	Rp5.680.000	DAU
05 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK		74%	Rp124.746.000	
05 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		74%	Rp42.034.000	
05 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	250 Dokumen	Rp5.678.000	DAU
05 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	1 Lembaga	Rp25.000.000	DAU
05 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	Rp5.678.000	DAU
05 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	250 Dokumen	Rp5.678.000	DAU
05 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN		80%	Rp11.356.000	
05 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	4 Dokumen	Rp5.678.000	DAU
05 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	250 Dokumen	Rp5.678.000	DAU





05 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		1 Orang	Rp60.000.000	
05 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	1 Orang	Rp60.000.000	DAU
05 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Berkinerja Baik		96%	Rp11.356.000	
05 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Dokumen	Rp5.678.000	DAU
05 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	30 Orang	Rp5.678.000	DAU
05 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp468.656.111	
05 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur		65%	Rp468.656.111	
05 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		65%	Rp468.656.111	
05 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	1 Laporan	Rp468.656.111	DAU



**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan.

Pada tahun rencana 2026, BKPSDM mendapatkan alokasi anggaran sementara untuk kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 7.949.391.965 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) serta prakiraan maju target dan alokasi anggaran pada tahun 2027 sebesar Rp.11.675.313.108 (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah). Uraian garis besar mengenai rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, disajikan pada tabel di bawah ini:





Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp7.949.391.965				Rp11.675.313.108
05 05	KEPEGAWAIAN				Rp7.480.735.854				Rp10.748.852.908
05 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp7.355.989.854			100%	Rp7.786.495.309
05 03 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	Rp5.750.000			100%	Rp8.126.500
05 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Dokumen	Rp3.750.000	DAU		5 Dokumen	Rp5.626.500
05 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	Rp2.000.000	DAU		1 Laporan	Rp2.500.000
05 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp6.241.127.965			100%	Rp6.477.121.381
05 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	25 Orang/Bulan	Rp6.079.391.965	DAU		45 Orang/Bulan	Rp6.281.420.821
05 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	12 Dokumen	Rp161.736.000	DAU		12 Dokumen	Rp195.700.560
05 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	Rp2.500.000





05	03	01	2.05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp147.500.000			100%	Rp257.602.950
05	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	3 Paket	Rp107.500.000	DAU		3 Paket	Rp221.302.950
05	03	01	2.05	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	3 Orang	Rp40.000.000	DAU		3 Orang	Rp36.300.000
05	03	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp757.224.584			100%	Rp508.435.950
05	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp1.000	DAU		1 Paket	Rp7.245.480
05	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	Rp64.475.016	DAU		3 Paket	Rp103.359.410
05	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM	2 Paket	Rp9.613.452	DAU		2 Paket	Rp26.825.700
05	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	Rp22.368.116	DAU		3 Paket	Rp60.300.350
05	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp17.243.000	DAU		3 Paket	Rp37.238.960
05	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	1 Laporan	Rp2.500.000	DAU		1 Laporan	Rp11.495.000
05	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	1 Laporan	Rp641.024.000	DAU		1 Laporan	Rp261.971.050
05	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp141.264.918			100%	Rp318.538.460
05	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM	2 Unit	Rp43.629.216	DAU		2 Unit	Rp124.880.000,00
05	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp24.887.298	DAU		1 Unit	Rp30.000.000
05	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	5 Unit	Rp56.245.235	DAU		4 Unit	Rp143.658.460
05	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	1 Unit	Rp16.503.169	DAU		1 Unit	Rp20.000.000
05	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp44.500.000			100%	Rp121.917.975
05	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	1 Laporan	Rp10.000.000	DAU		1 Laporan	Rp76.154.375
05	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	Rp14.500.000	DAU		1 Laporan	Rp20.763.600



Rencana Kerja BKPSDM RKA

2026



05	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	0 Laporan	Rp 20.000.000	DAU		0 Laporan	Rp25.000.000
05	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp18.622.387			100%	Rp94.752.093
05	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	12 Unit	Rp12.942.387	DAU		16 Unit	Rp25.745.793
05	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	15 Unit	Rp5.680.000	DAU		1 Unit	Rp69.006.300
05	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK		74%	Rp124.746.000			72,63%	Rp2.962.357.599
05	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		74%	Rp42.034.000			92%	Rp327.858.461
05	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	250 Dokumen	Rp5.678.000	DAU		1 Dokumen	Rp118.173.900
05	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	1 Lembaga	Rp25.000.000	DAU		2 Lembaga	Rp50.000.000
05	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	Rp5.678.000	DAU		1 Dokumen	Rp73.936.720
05	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	250 Dokumen	Rp5.678.000	DAU		25 Dokumen	Rp85.747.841
05	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN		80%	Rp11.356.000			70%	Rp2.136.236.938
05	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	4 Dokumen	Rp5.678.000	DAU		4 Dokumen	Rp1.804.684.288
05	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	250 Dokumen	Rp5.678.000	DAU		350 Dokumen	Rp331.552.650
05	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		1 Orang	Rp60.000.000			30%	Rp140.376.000
05	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	1 Orang	Rp60.000.000	DAU		600 Orang	Rp140.376.000
05	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Berkinerja Baik		96%	Rp11.356.000			98,5%	Rp357.886.200
05	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Dokumen	Rp5.678.000	DAU		34 Dokumen	Rp111.407.100



05	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	30 Orang	Rp5.678.000	DAU		5230 Orang	Rp246.479.100
05	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp468.656.111				Rp926.460.200
05	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur		65%	Rp468.656.111			47%	Rp926.460.200
05	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		65%	Rp468.656.111			47%	Rp926.460.200
05	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	1 Laporan	Rp468.656.111	DAU		1 Laporan	Rp926.460.200





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sangat penting dalam menentukan arah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar lebih terkoordinir, terintegrasi dan sinergis untuk memaksimalkan pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif dan efisien sesuai dengan pengukuran skala prioritas yang sudah dipertimbangkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat menjadi indikator pencapaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara terorganisir baik itu dalam sebuah tim, individu maupun institusi organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Melalui Rencana Kerja 2026 maka penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian akan lebih terkoordinasi dan sinergis dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan skala prioritasnya. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi dalam mengemban visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas.

Dalam Pelaksanaannya nanti rencana kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 196801262000032002